

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa kajian dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini. Beberapa kajian dan penelitian tersebut diantaranya adalah oleh Hadiah Putri Prtamawati pada tahun 2018 dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Umum BUMN Tahun 2012-2016. Variable yang digunakan adalah variable dependen dan independen. Variabel dependen adalah *Non Performing Loan* (NPL). Sedangkan variabel independen adalah Inflasi, Kurs, *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Penelitian ditujukan untuk mengetahui dampak inflasi, kurs, *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Non Performing Loan* (NPL) baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan adalah dengan regresi data panel. Populasinya adalah jumlah bank umum BUMN yang berjumlah 4 bank dan sampel juga berjumlah 4 bank tersebut dengan teknik sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi dan CAR tidak berpengaruh terhadap NPL. LDR dan BOPO

berpengaruh positif terhadap NPL. Sedangkan Kurs berpengaruh negatif terhadap NPL.

Penelitian kedua oleh Dahlia Wati, Jeni Susyanti, dan M. Agus Salim pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Rasio *CAMELS* dan *Bank Size* terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Umum BUMN di Indonesia. Pada penilitan ini dikhususkan kepada bank yang melakukan publikasi keuangannya di Bura Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011 sampai 2016. Sedangkan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang berjumlah 4 Bank BUMN. Metode yang digunakan adalah dengan Model Regresi dan Asumsi Klasik. Hasil dari peneilitian ini secara simultan bahwa variable bebas atau *CAMELS* dan *Bank Size* keduanya berpengaruh positif terhadap NPL pada Bank Umum BUMN di Indonesia.

Penelitian ketiga oleh Kade Purnawa Dewi dan I Wayan Ramadhana pada tahun 2015 tentang Pengaruh *Loan to Deposit Ratio*, Suku Bunga SBI, dan *Bank Size* terhadap *Non Performing Loan* pada Bank Umum BUMN periode 2010-2012. Variabel dependen diwakili oleh *Non Performing Loan* (NPL) dan variabel independen adalah *Loan to Deposit Ratio*, Suku Bunga SBI, dan *Bank Size*. Metode yang digunakan adalah dengan teknik data regresi linier berganda dengan sampel Bank BUMN. Hasil pengujian dari penilitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan

Bank Size serta pengaruh positif oleh Suku Bunga SBI terhadap *Non performing Loan* (NPL) Bank Umum BUMN di Indonesia tahun 2010-2012.

Penelitian keempat oleh John Agustinus pada tahun 2008 tentang Variabel-Variabel yang Mempengaruhi *Non Performing Loan* pada Bank BUMD, BUMN dan BUSN di Kota Jayapura tahun 2006-2007. Variabel yang diuji adalah penilaian agunan, besaran kredit, lokasi, dan petugas bank. Sedangkan variabel independen adalah *Non Performing Loan* (NPL). Pengumpulan data berupa *full sample* sejumlah 14 bank. Metode yang digunakan adalah dengan regresi linier berganda dengan hasil adanya pengaruh secara simultan variabel-variabel diatas terhadap variabel NPL. Variabel penilaian agunan, besaran kredit, dan lokasi berpengaruh positif terhadap NPL. Sedangkan variabel petugas bank berpengaruh negatif terhadap NPL.

Penelitian yang kelima oleh Iksan Adisaputra pada tahun 2012 tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan* Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penelitian ini menguji variabel dependen berupa *Non Performing Loan* (NPL) dan variabel independen berupa *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Net Interest Margin* (NIM), dan Efisiensi Operasi (BOPO) terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada Bank Mandiri periode Juni 2001 hingga Desember 2010. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan t-statistik

untuk menguji secara parsial dan f-statistik. Dari hasil pengujian bersama-sama dari penelitian tersebut, didapati variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Net Interest Margin* (NIM), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL). Sedangkan secara parsial, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Loan to Deposit Ratio* (LDR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL), sementara *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL).

Penelitian keenam oleh Aprilia pada tahun 2012 tentang pengaruh Inflasi, BI rate dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL) pada bank umum di Indonesia (studi kasus pada bank umum BUMN di Indonesia tahun 2005-2011). Variabel dependen diwakili oleh *Non Performing Loan* (NPL) dan variabel independen adalah Inflasi, BI rate, dan *Loan to Deposit Ratio*. Sampel dari penelitian ini adalah bank umum yang terdiri dari Bank BUMN, BUSN Devisa, BUSN Non Devisa, BPD, dan Bank Campuran. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Hasil uji penelitian tersebut secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Secara parsial, inflasi dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh negatif. Namun *BI rate* sebaliknya berpengaruh positif terhadap *Non Performing Loan* (NPL).

Penelitian ketujuh oleh Muhamad Syaeful Anwar pada tahun 2017 tentang NPL pada skripsinya yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Kredit pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah”. Variabel yang digunakan peneliti adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Assets* (ROA), dan *Non Performing Loan* (NPL). Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, didapati bahwa *Non Performing Loan* (NPL) pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.04% untuk tahun 2014 sedangkan tahun 2015 sebesar 3% tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan Bank Indonesia (BI) sebesar 5%. Tingkat kolektabilitas kredit bermasalah pada PD. BPR BKK Purwodadi Cabang Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dinyatakan lancar.

Penelitian kedelapan yang oleh Thamrin pada tahun 2016 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Salo Kabupaten Pinrang”. Variabel yang digunakan oleh peneliti adalah faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk. unit Salo Kabupaten Pinrang. Indikator faktor internal berupa jaminan dan pengawasan kredit, sedangkan faktor eksternal indikatornya berupa karakter debitur, kondisi usaha, dan kemampuan manajerial. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapati bahwa jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah, pengawasan kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah, karakter debitur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah, kondisi usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah, dan kemampuan manajerial debitur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah. Dari kedua faktor dalam penelitian ini, variabel faktor eksternal merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap tingkat kredit bermasalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Salo Kabupaten Pinrang.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran lainnya (Kasmir, 2013).

Menurut (Silvanita, 2009) bank merupakan lembaga keuangan yang mampu memobilisasi dana, mengumpulkan, dan mengalokasikan dana dalam jumlah besar ketimbang lembaga keuangan lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah *“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang luas atau yang lebih dikenal dengan istilah *funding* (Kasmir, 2014).

2.2.2. Jenis Bank

Terdapat beberapa jenis perbankan di Indonesia yang dalam praktiknya telah diatur oleh Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang yang terdahulu diatur dalam UU No 14 Tahun 1967, dan keluar dalam Undang-Undang yang baru dalam UU Perbankan No 10 Tahun 1998 (Kasmir, 2014).

Jenis-jenis perbankan dapat dilihat dari beberapa segi:

1. Dilihat Dari Segi Fungsinya

Menurut fungsinya, jenis perbankan yang tertera dalam UU Pokok Perbankan no 14 Tahun 1967 adalah Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Tabungan, dan Bank Pegawai. Namun terdapat perubahan jenis setelah munculnya UU Pokok Perbankan No 7 Tahun 1992 dan ditegaskan dengan UU RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan menjadi:

- a. Bank Umum
- b. Bank Perkereditan Rakyat

2. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya

Dari segi kepemilikannya dapat diartikan sebagai pemilik bank tersebut. Dari segi kepemilikannya dapat dibagi menjadi berikut:

- a. Bank Milik Pemerintah
- b. Bank Milik Swasta Nasional
- c. Bank Milik Koperasi
- d. Bank Milik Asing
- e. Bank Milik Campuran

3. Dilihat Dari Segi Status

Dari statusnya sebagai lembaga yang melayani masyarakat dan kedudukannya, bank dapat dibagi menjadi dua macam.

- a. Bank Devisa
- b. Bank Non Devisa

4. Dilihat Dari Segi Cara Menentukan Harga

Dari cara bank dalam menentukan harga beli maupun harga jual, bank dibagi dalam dua kelompok.

- a. Bank Yang Berdasarkan Prinsip Konvensional
- b. Bank Yang Berdasarkan Prinsip Syariah

2.2.3. Kegiatan Bank

Pembagian bank berdasarkan pelaksanaan kegiatannya terdiri atas bank umum, bank perkreditan rakyat, bank campuran, dan bank asing. Kegiatan bank umum lebih luas dari bank perkereditan rakyat (Kasmir, 2013). Adapun kegiatan-kegiatan bank yang ada pada umumnya adalah:

1. Kegiatan-kegiatan Bank Umum:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito.

- b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan.
 - c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti transfer, inkaso, kliring, dll.
2. Kegiatan-kegiatan Bank Perkereditan Rakyat
- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan, tabungan, dan deposito.
 - b. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan.
3. Kegiatan-kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing
- a. Dalam mencari bank asing dan bank campuran dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
 - b. Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu.

2.2.4. Penilaian Kesehatan Bank

Penilaian suatu kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatan oeperasinya (Kasmir, 2014).

Penilaian tingkat kesehatan bank sendiri dimaksudkan untuk menilai keberhasilan perbankan dalam perekonomian Indonesia dan industri

perbankan serta dalam menjaga fungsi intermediasi. Pada krisis ekonomi global, bank-bank menengah dan kecil yang tidak menerima bantuan likuiditas dari pemerintah mengalami penurunan dana simpanan masyarakat. Menurunnya dana simpanan masyarakat membuat industri perbankan berusaha mempertahankan dana-dana yang mereka miliki untuk menjaga likuiditas bank dengan cara memberikan tingkat suku bunga yang tinggi. Bank Indonesia menilai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi suatu bank. Metode atau cara penilaian tersebut kemudian dikenal dengan metode *CAMELS* yaitu *Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity, dan Sensitivity to Market Risk* (Kasmir, 2014).

Penilaian baik buruknya kondisi bank dapat dianalisa yang biasa dikenal dengan *CAMELS* (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*) (Kasmir, 2014).

a. Aspek Permodalan (*Capital*)

Yang dinilai adalah permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada *CAR* (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan BI.

b. Aspek Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Yaitu untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan oleh Bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif.

c. Aspek kualitas manajemen (*Management*)

Dalam mengelola kegiatan bank sehari-hari juga dinilai kualitas manajemennya. Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja.

d. Aspek Rentabilitas (*Earning*)

Merupakan ukuran kemampuan bank dalam meningkatkan labanya apakah setiap periode atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Penilaian ini juga dilakukan dengan ROA dan BOPO.

e. Aspek Likuiditas (*Liquidity*)

Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit layak dibiayai.

f. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar meliputi kemampuan modal bank dalam mengatasi potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi

(*adverse movement*) suku bunga dan nilai tukar kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

2.2.5. Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan dengan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya selama jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Defenisi kredit secara umum merupakan pemberian baik uang, barang, maupun jasa yang dilakukan oleh pihak kreditur yang didasari dengan unsur kepercayaan kepada debiturnya serta terdapat kesepakatan antara kreditur dengan debitur baik mengenai jangka waktu pengembalian barang, jasa dan uang, maupun kesepakatan mengenai balas jasa (bunga) yang diperoleh dari operasi tersebut.

A. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan dari pemberian kredit oleh suatu bank haruslah sejalan dengan visi dan misi perbankan tersebut. Berikut tujuan pemberian kredit (Kasmir, 2014):

a. Mencari Keuntungan

Hasil utama yang juga menjadi pendapatan perbankan adalah dari kredit yang berupa tambahan nilai, atau yang biasa disebut dengan bunga. Hasil yang berupa bunga ini sebagai balas jasa atas kredit yang diberikan bank.

b. Membantu Usaha Nasabah

Dengan adanya kredit, harapannya nasabah dapat mengembangkan usahanya tanpa ada kendala dari segi finansial.

c. Membantu Pemerintah

Asumsi pemerintah dengan adanya kredit adalah adanya perputaran uang yang dianalogikan dengan adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Disamping tujuan dari kredit, ada fungsi dari kredit yang diberikan oleh bank. Fungsi kredit diantaranya adalah:

a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Ketika suatu uang mengendap, maka tidak akan menghasilkan nilai tambah dan memberikan manfaat. Namun apabila ditabungkan dan

disalurkan oleh pihak bank maka akan memberikan manfaat bagi kreditur yang membutuhkan uang atau dana.

b. Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Dengan adanya peredaran uang yang dimulai dari pencairan kredit oleh suatu bank, maka daerah yang kekurangan uang bisa mendapatkan tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk Meningkatkan Daya Guna Barang

Pemberian kredit dapat menciptakan pemanfaatan barang dari yang sebelumnya tidak berguna menjadi barang yang berguna.

d. Meningkatkan Peredaran Barang

Disamping dapat meningkatkan peredaran uang, kredit juga dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan peredaran barang dari suatu daerah ke daerah yang lainnya.

e. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Adanya kredit juga akan menambah jumlah barang yang beredar, baik berupa ekspor atau impor barang. Disamping itu, kredit juga dapat digunakan untuk menambah jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat.

f. Meningkatkan Kegairahan Berusaha

Dengan adanya kredit, para pengusaha yang sebelumnya terkendala terkait permasalahan finansial dapat menjadi sebuah solusi dengan adanya kredit.

g. Untuk Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Penyaluran kredit untuk suatu pembangunan yang tentunya membutuhkan tenaga kerja akan menjadikan berkurangnya tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

h. Untuk Meningkatkan Hubungan Internasional

Kebutuhan akan tambahan dana suatu negara tentunya tidaklah sedikit. Maka suatu negara akan melakukan kredit kepada negara lain atau Bank Dunia. Maka dengan adanya kredit atau peminjaman dana dari suatu negara ke negara yang lain akan semakin meningkatkan hubungan internasional antara negara satu dengan negara yang lainnya atau negara kreditur dan negara peminjam. Dan tentunya akan berdampak pada kerja sama pada bidang lainnya.

B. Klasifikasi Kredit

Ada beberapa macam kredit yang terdapat di Indonesia. Kredit yang disalurkan dikelompokkan menjadi berikut (Manurung & Rahardja, 2004):

1. Berdasarkan Jangka Waktu

Pengelompokan kredit berdasarkan jangka waktu dibagi menjadi kredit jangka pendek (*short term loan*), kredit jangka menengah (*medium term loan*), dan kredit jangka panjang (*long term loan*).

a. Kredit Jangka Pendek (*Short Term Loan*)

Merupakan kredit yang pelunasannya dalam waktu yang relatif singkat, setahun atau kurang. Dalam jangka pendek yang sering dipakai adalah untuk penyediaan dana atau untuk modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah (*Medium Term Loan*)

Merupakan kredit yang kurun waktu pelunasannya memiliki waktu yang cukup lama, biasanya dalam durasi satu sampai tiga

tahun. Penggunaan kredit jangka menengah biasanya untuk modal perusahaan.

c. Kredit Jangka Panjang (*Long Term Loan*)

Merupakan kredit yang pelunasannya memiliki waktu yang lama, biasanya dalam jangka waktu tiga sampai lima tahun. Penggunaan kredit jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk investasi.

2. Berdasarkan jaminan

Dalam klasifikasinya, penyaluran kredit berdasarkan jaminan dibagi menjadi kredit dengan jaminan (*secured loan*) dan kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) (Manurung & Rahardja, 2004).

a. Kredit Dengan Jaminan (*Secured Loan*)

Dapat diartikan sebagai kredit yang disertai dengan agunan atau jaminan. Untuk agunan atau jaminan yang akan dijaminkan harus memiliki nilai lebih besar dari kredit yang diajukan.

b. Kredit Tanpa Jaminan (*Unsecured Loan*)

Adalah kredit yang tanpa disertai agunan atau jaminan tertentu, dan biasanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan beberapa alasan dan persyaratan. Diantaranya, kepada pihak yang

memang terpercaya atau memiliki hubungan yang sangat baik dengan bank. Dan yang kedua, pihak yang memiliki prospek usaha yang sangat baik dan memiliki reputasi yang cukup baik dengan bank.

3. Berdasarkan Sekmen Usaha

Pengelompokan klasifikasi kredit juga berdasarkan pada sekmen usaha dimana dapat dikelompokkan menjadi kredit pertanian, industri, dan kredit jasa (Manurung & Rahardja, 2004).

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang disalurkan untuk sektor pertanian, peternakan dan perkebunan. Bentuk kredit ini disalurkan kepada petani-petani langsung dipedesaan.

b. Kredit Industri

Merupakan kredit yang penyalurannya difokuskan untuk sektor industri kecil dan rumah tangga, namun ada juga yang untuk industri besar.

c. Kredit Jasa

Merupakan kredit yang penyalurannya ditujukan untuk sektor jasa. Baik berupa UMKM, pedagang kecil/kelontongan, dan rumah makan.

4. Berdasarkan Tujuan

Penggolongan kredit berdasarkan tujuan dibagi menjadi 3, kredit komersial (*commercial loan*), kredit konsumsi (*consumer loan*), dan kredit produktif (Manurung & Rahardja, 2004).

a. Kredit Komersial (*Commercial Loan*)

Kredit komersial ditujukan untuk memudahkan para nasabah yang khususnya para pedagang untuk kelancaran usahanya.

b. Kredit Konsumsi (*Consumer Loans*)

Kredit konsumsi ditujukan kepada para nasabah kreditur dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya, baik berupa barang maupun keperluan yang lainnya.

c. Kredit Produktif

Kredit produktif ditujukan untuk para kreditur dalam memperlancar usahanya, difokuskan dalam hal operasional usahanya.

5. Berdasarkan Penggunaan

Dalam pengklasifikasiannya, kredit berdasarkan penggunaan terbagi menjadi kredit modal kerja dan kredit modal investasi (Manurung & Rahardja, 2004).

a. Kredit Modal Kerja

Berupa kredit yang bersifat sebagai suntikan atau pendorong bagi usaha yang didanai, walau untuk sementara waktu arus kas masuk lebih kecil dari arus kas keluar.

b. Kredit Investasi

Sesuai dengan namanya, kredit investasi diberikan kepada kreditur yang ingin membeli barang modal maupun jasa.

6. Kredit Non Cash (*non cash loan*)

Dalam dunia perkreditan, biasanya bentuk kredit yang pada umumnya adalah kredit dengan bank mengeluarkan uang kepada

kreditur. Namun kredit *non cash* tidak selalu menyebabkan bank untuk mengeluarkan uang. Diantaranya adalah bank garansi (*bank guaranty*) dan *letter of credit* (l/c) (Manurung & Rahardja, 2004).

a. Bank Garansi (*Bank Guaranty*)

Adalah bentuk lain dari kredit yang tidak berupa uang yang dikeluarkan oleh bank, melainkan berupa jaminan yang berbentuk surat berharga.

b. *Letter of Credit* (L/C)

Berbentuk sebuah fasilitas yang diberikan bank guna memperlancar transaksi nasabah, terutama untuk perdagangan internasional.

2.2.5.1. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang akan disalurkan kepada nasabah haruslah sesuai dengan unsur-unsur dalam pemberian kredit. Unsur-unsur dalam pemberian kredit adalah (Kasmir, 2014):

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, dan jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank,

dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka panjang menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yng lalai, maupun risiko yang tidak disengaja.

Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.2.6. Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Tahapan ini dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit, yang meliputi beberapa kegiatan berikut (Kasmir, 2014):

a. Kegiatan prakarsa permohonan kredit.

Kegiatan pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan kredit dari nasabah atau memprakarsai permohonan kredit, baik untuk permohonan kredit baru, perpanjangan kredit, perubahan jumlah kredit, perubahan syarat kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit. Permohonan kredit diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon/calon nasabah termasuk riwayat kreditnya pada bank lain (kalau ada). Pejabat pemrakarsa kredit selanjutnya kemudian melakukan kegiatan pencarian informasi selengkap-lengkapnyanya dari berbagai sumber mengenai pemohon.

b. Kegiatan analisa dan evaluasi kredit.

Dari data dan informasi yang diperoleh pejabat pemrakarsa melakukan analisis dan evaluasi tingkat risiko kredit. Analisa dan evaluasi kredit dituangkan dalam format yang telah ditetapkan oleh bank dan disesuaikan dengan jenis kreditnya. Dalam analisa tersebut sekurang-kurangnya mencakup informasi tentang identitas pemohon, tujuan permohonan kredit, dan riwayat hubungan bisnis dengan bank. Analisis kredit yang dilakukan oleh pejabat pemrakarsa kredit meliputi analisis 5C yang terdiri

dari analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif dilakukan terhadap kualitas dan stabilitas usaha dengan mempertimbangkan posisi pasar dan persaingan, prospek usaha, karakter pemohon, latar belakang dan kualitas manajemennya. Analisa kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis kondisi keuangan pemohon untuk mengetahui usulan kredit yang dapat diterima atau ditolak.

c. Perhitungan kebutuhan kredit.

Perhitungan kebutuhan kredit dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti kredit yang benar-benar dibutuhkan oleh pemohon. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kelebihan kredit yang penggunaannya diluar usaha atau terjadi kekurangan kredit sehingga usaha tidak berjalan. Apabila dipandang perlu untuk mengetahui kepastian kredit yang dibutuhkan pemohon, bank dapat meminta studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan atas beban biaya pemohon.

d. Pembagian risiko kredit.

Dalam upaya mengurangi risiko kredit yang harus ditanggung, bank membagi risiko tersebut dengan perusahaan asuransi, yaitu dengan melakukan asuransi kredit, asuransi kerugian maupun asuransi jiwa debitur.

e. Negoisasi kredit.

Setelah kegiatan-kegiatan di atas, langkah berikutnya adalah menguji kekuatan, kelemahan dan identifikasi risiko yang merupakan kesimpulan dari seluruh analisa kredit. Kesimpulan tersebut harus mencakup hal-hal sebagai berikut; pejabat pemrakarsa dapat menyimpulkan bahwa usaha debitur yang akan dibiayai mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, identifikasi risiko-risiko yang akan mengancam kelangsungan usaha pemohon atau merupakan titik kritis dari usaha yang akan dibiayai, serta melakukan antisipasi terhadap risiko-risiko tersebut yang dituangkan dalam syarat dan ketentuan kredit. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan selanjutnya pejabat pemrakarsa kredit melakukan negoisasi dengan calon nasabah.

2.2.7. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilainnya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan & 7P. Metode analisis 5C, antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2014):

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi

suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Metode analisis 7P, antara lain sebagai berikut (Kasmir, 2014):

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Selain itu juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.

2. *Party*

Mengklasifikasi nasabah kedalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya sehingga nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berbeda pula.

3. *Perpose*

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau tidak.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.2.8. Kredit bermasalah

Kredit Bermasalah, Menurut (Kuncoro & Suhardjono, 2002) kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan

misalnya persyaratan pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman bunga, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 rasio NPL total kredit adalah rasio antara jumlah total kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap total kredit. Menurut (Riyadi, Iqbal, & Lauren, 2014) rasio NPL merupakan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan tingkat kolektibilitas yang merupakan kredit bermasalah dibandingkan dengan total kredit yang diberikan oleh bank. Rasio NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \text{Kredit Bermasalah} \times 100\% : \sum \text{Kredit}$$

Menurut (Ismail, 2010), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah. Pembagian akuntansi kredit bermasalah terdiri dari:

- a. Pengakuan pendapatan bunga kredit *Non Performing Loan* terjadi bila debitur tidak membayar angsuran pinjaman pokok maupun bunga setelah 90 hari. Pendapatan bunga kredit untuk kredit *Non Performing Loan* diakui atas dasar *cash* basis, yaitu pengakuan pendapatan kredit pada saat adanya pembayaran dari debitur. Pendapatan bunga kredit *Non Performing Loan* diakui sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian yang tidak dicatat dalam laporan laba rugi tetapi dicatat dalam tagihan kontijensi.

b. Pembayaran kewajiban *Non Performing Loan* akan diterapkan apabila kredit termasuk golongan kredit kurang lancar, maka prioritas pembayarannya adalah pembayaran bunga, denda, dan lain-lain, kemudian sisanya digunakan untuk pembayaran pinjaman pokok. Golongan kredit diragukan dan kredit macet, prioritas pembayaran adalah untuk pembayaran pokok dan sisanya digunakan untuk pembayaran bunga, denda, dan biaya lainnya.

Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut (Hariyani, 2010), apabila penyelamatan kredit yang dilakukan oleh bank ternyata tidak berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet (*write-off*). Penghapusan kredit macet terbagi dalam dua tahap yaitu hapus buku atau penghapusan secara bersyarat atau *conditional write-off*, dan hapus tagih atau penghapusan secara mutlak atau *absolute write-off*. Jika kemudian program hapus buku dan hapus tagih juga belum berhasil mengembalikan dana kredit yang disalurkan kepada debitur, maka bank dapat menyelesaikan portofolio kredit macet tersebut melalui jalur litigasi (proses peradilan) maupun jalur non-litigasi (diluar proses peradilan).

2.2.9. Loan to Depocit Ratio (LDR)

Loan to Depocit Ratio (LDR) memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan apakah perbankan tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka

pendek atau sering disebut dengan likuiditas. Likuiditas ini sangat penting untuk melihat apakah perbankan tersebut dapat memenuhi permintaan nasabahnya, apabila nasabahnya membutuhkan atau mengambil dananya secara mendadak dan atau menyalurkan pinjaman (kredit) kepada peminjam (debitur) (Macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id, 2017).

2.2.10. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan pada suatu modal yang dapat menunjukkan apakah suatu perbankan sanggup menyediakan dana untuk mengatasi akan adanya kemungkinan kerugian. Dalam hal ini, ketika CAR memiliki nilai yang cukup besar, maka perbankan tersebut memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. Selain CAR ini penting untuk melihat apakah perbankan tersebut sanggup dalam melewati kemungkinan kerugian yang ada, hal ini juga secara tidak langsung akan memberikan perlindungan terhadap nasabah serta dalam menjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan (Macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id, 2017).

CAR pada kehidupan perbankan di Indonesia sangatlah penting. Peraturan dari Bank Indonesia bahwa suatu bank harus memiliki nilai CAR lebih dari 8% serta bank tersebut harus memperlihatkan seberapa besar aktiva

bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) (Hariyani, 2010).

2.2.11. Suku Bunga acuan Bank Indonesia (BI rate)

BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (www.bi.co.id, n.d.). Dalam segala hal, *BI rate* berhubungan langsung dengan suku bunga kredit yang akan berdampak langsung pada perusahaan. Namun hal ini cukup berbeda, karena ketika *BI rate* turun, maka suku bunga kredit tidak ikut turun sebesar *BI rate*. Hal ini dikarenakan *BI rate* merupakan suku bunga acuan, sehingga ketika *BI rate* turun, maka perbankan umum dapat menurunkan suku bunganya, baik tabungan/deposito, maupun suku bunga kredit, tetapi hal ini pada perbankan menurunkan suku bunga tabungan/deposito, pada suku bunga kredit tidak diturunkan (Liembono, 2016).

Namun, Bank Indoneisa melakukan kenaikan atau menurunkan suku bunga atau *BI rate* biasanya untuk merespon atau menanggapi inflasi yang ada. Ketika inflasi tinggi atau nilai tukar rupiah merosot, maka *BI rate* naik, begitu pula apabila nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing merosot, maka suku bunga *BI rate* harus naik (Widoatmojo, 2017). *BI rate* merupakan suatu indikator dalam penilaian fundamental perekonomian negara (Mukhlis, 2015). Hal ini berkaitan langsung apabila suku bunga dapat mengakibatkan

perubahan dalam permintaan uang atau dapat disebut dengan kredit. Perkembangan faktor makro seperti bunga, inflasi, dan nilai tukar tentunya akan mempengaruhi perekonomian suatu negara (Naibaho & Rahayu, 2018).

2.3. Hipotesis

Adapun hipotesis menurut penulis pada penelitian ini yaitu:

- a. Diduga *Capital Adequacy Ratio*(CAR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Loan* (NPL).
- b. Diduga *Loan to Depocit Ratio* (LDR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Loan* (NPL).
- c. Diduga *BI rate* berpengaruh positif terhadap *Non Performing Loan* (NPL).

2.4. Kerangka Penelitian

Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

